



PKL Masih Nunggak Kredit Rp 111 Juta

JOGJA -- Para pedagang kaki lima (PKL) di Jogja yang mengambil kredit pembelian tenda masih menunggak Rp 111 juta. Kredit tenda dikucurkan mulai 2006 dengan dana dari Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta sebesar Rp 1,25 miliar.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Pertanian (Perindagkoptan) Kota Yogyakarta, Sugeng Darmanto di Balaikota Timoho, Kamis (14/5), mengatakan, penyaluran dan pengalihan diserahkan kepada Bank Jogja.

Dituturkan, harga tenda bervariasi sesuai keinginan PKL, umumnya sekitar Rp 1,75 juta. Akad kredit dan urusan teknis lainnya diserahkan Bank Jogja,

Pemkot sebatas melakukan monitoring pola angsuran sembari mengingatkan PKL yang masih menunggak untuk segera melunasinya.

"Guliran kita dulu Rp 1,25 miliar, sekarang yang sudah disetor ke kas daerah sampai Maret 2009 sudah sekitar Rp 1,1 miliar. Kalau melihat jumlah gulirannya, tunggakan itu tidak terlampau besar," ujarnya.

Menurutnya, kredit tenda sudah dihentikan tahun ini. Uang pelunasan kredit tenda digunakan untuk program lain, namun masih dalam kerangka penguatan ekonomi masyarakat.

Pada bagian lain, Sugeng menyampaikan, Pemkot akan mem-

>> KE HAL 10

PKL Masih Nunggak

Sambungan dari halaman 1

berikan bantuan sosial kepada para PKL, termasuk PKL di Jalan Pakuningratan. PKL Pakuningratan diminta membongkar bangunan semi permanen tempat berdagang dan menggantinya dengan tenda.

"Tapi kita lihat kondisinya dulu, boleh nggak jalan itu untuk PKL. Kalau Perwal tentang PKL hanya membolehkannya di persil dengan seizin pemilik persil. Tapi keinginan wilayah, tempat itu boleh untuk PKL," jelasnya.

Dikatakan, bantuan sosial

yang akan diberikan berbeda dengan kredit tenda yang digulirkan Pemkot pada 2006, meskipun tetap bisa digunakan untuk membeli tenda. Bantuan sosial bukan pinjaman, melainkan hampir sama dengan hibah. Selain itu, PKL yang ingin memperoleh bantuan sosial harus mengajukan proposal.

"Tidak banyak yang mengajukan bantuan tenda. Berdasarkan proposal-proposal yang sudah masuk, sebagian besar PKL meninggalkan bantuan untuk modal kerja," terang dia.

(fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Per	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 18 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005